

LAPORAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN - 4

Tahun 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KAB. LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jallah atas perkenaan-Nya sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan baik.

Laporan Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan IV Tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran di tahun berikutnya.

Kami sadar bahwa laporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 8 Januari 2026

Kepala Badan,



SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis / Permasalahan.....	6
E. Landasan Hukum	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi.....	9
2. Misi.....	9
3. Tujuan	9
4. Sasaran Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja	17
1. Sasaran Strategis – 1	18
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-IV)	18
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-IV dengan tahun sebelumnya	19
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-IV dengan target jangka menengah	21
4. Perbandingan dengan target nasional	21
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	22
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	23
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja	25

2. Sasaran Strategis - 2	36
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-IV)	38
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-4 dengan tahun sebelumnya	38
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-IV dengan target jangka menengah	39
4. Perbandingan dengan target nasional	39
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	40
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	41
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.....	43
3. Sasaran Strategis - 3.....	48
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-IV)	49
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-IV dengan tahun sebelumnya	50
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-IV dengan target jangka menengah	51
4. Perbandingan dengan target nasional	51
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	52
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	53
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.....	55
4. Sasaran Strategis - 4	57
1. Perbandingan antara target kinerja tahun ini (triwulan-IV)	58
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan-IV dengan tahun sebelumnya	58
3. Perbandingan capaian kinerja triwulan-IV dengan target jangka menengah	59
4. Perbandingan dengan target nasional	60

5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran	61
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	62
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.....	63
B. Realisasi Anggaran	81
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	88
BAB IV PENUTUP	101
Lampiran – Lampiran	
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja, maka perlu disusun Laporan Kinerja Intern Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian laporan ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mengontrol perkembangan dan kemajuan Perangkat Daerah dalam mengukur kinerja Perangkat Daerahnya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan ini menggambarkan diantaranya pengukuran kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 pada Triwulan IV yang meliputi sasaran strategis, indikator sasaran, target serta realisasi program dan realisasi anggaran. Dan untuk selanjutnya laporan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Organisasi Pemerintah Daerah Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

B. MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- a. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Fungsi, secara singkat fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
 2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Politik;
 3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekertaris; membawahi
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan core value berAKHLAK yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional, yang meliputi

1. Berorientasi Pelayanan
 - a. Memberikan pelayanan rekomendasi izin kegiatan dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan cepat, mudah, dan ramah kepada masyarakat dan kelompok organisasi kemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
2. Akuntabel
 - a. Menjamin bahwa setiap proses pelayanan yang dilakukan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, disiplin dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang diberikan
3. Kompeten
 - a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penggunaan teknologi digital dalam layanan rekomendasi izin kegiatan dan layanan organisasi kemasyarakatan
4. Harmonis
 - a. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - b. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan
5. Loyal
 - a. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
6. Adaptif
 - a. Menerapkan inovasi digital yang mudah diakses untuk mempercepat proses pelayanan;

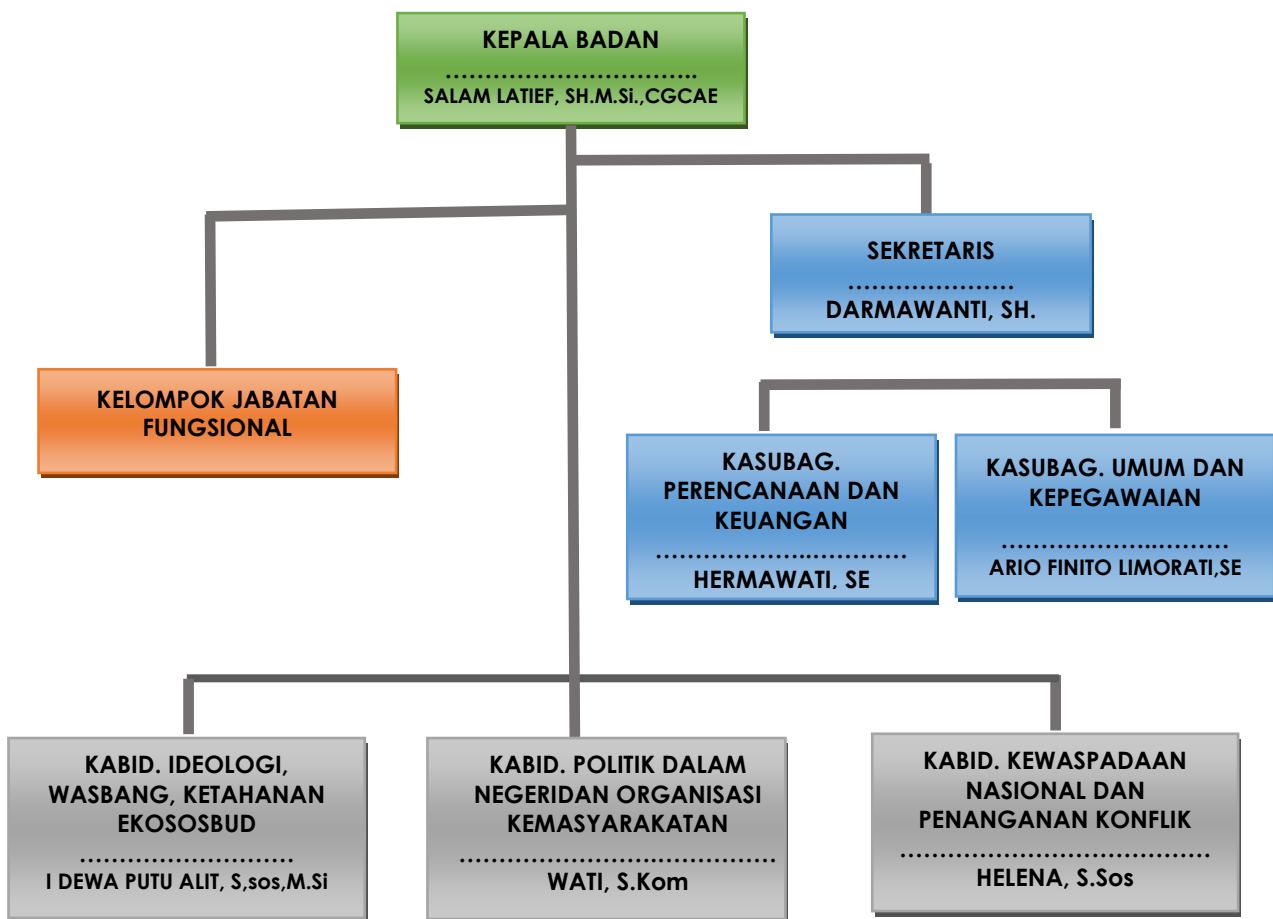
7. Kolaboratif

a. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekertaris, kepala sub bagian dan para Kepala Bidang sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol



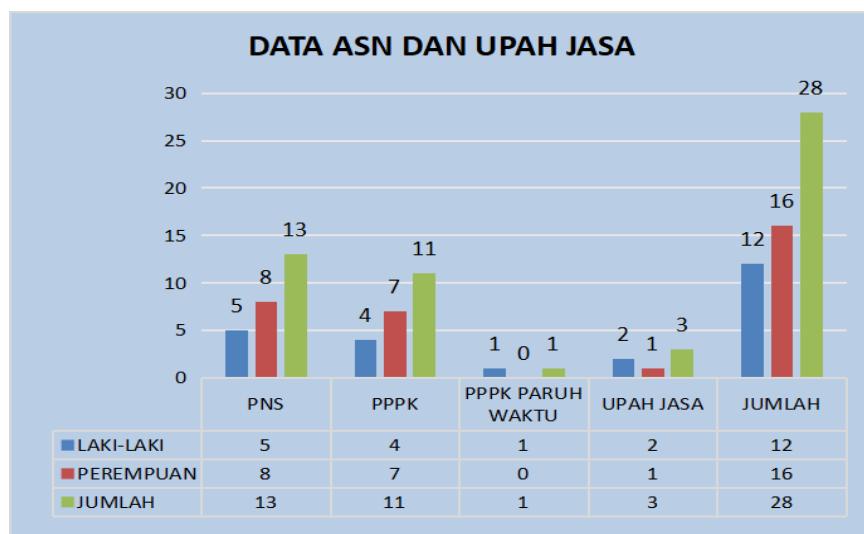
3. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten

Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap di lingkup Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 1.1
Komposisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepgawainan Kesbangpol

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pada instansi Kesbangpol baik Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin berjumlah 28 orang yaitu Laki-Laki sebanyak 12 orang (42,9%) dan Perempuan sebanyak 16 orang (57,1%).

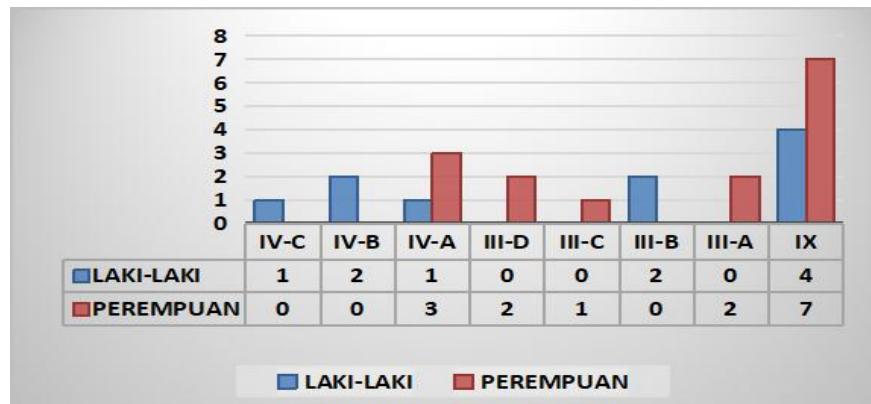
Diagram 1.2
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepgawainan Kesbangpol

Dari diagram di atas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur baik PNS, PPPK maupun Upah Jasa Triwulan IV tahun 2025, berdasarkan jenjang Pendidikan meliputi : SD sebanyak 1 orang atau 3,57%, SMA sebanyak 2 orang atau 7,14%, S1 sebanyak 23 orang atau 78,6%, dan S2 sebanyak 2 orang atau 7,14%.

**Diagram
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan / Ruang**



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepgawainan Kesbangpol

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja(PPPK) yang terdapat pada Badan Kesbangpol berdasarkan golongan/ruang pada triwulan 4 tahun 2025 terdiri dari golongan IV/c sebanyak 1 orang (4%), golongan IV/b sebanyak 2 orang (8%), golongan IV/a sebanyak 4 orang (16%), golongan III/d sebanyak 2 orang (8%), golongan III/c sebanyak 1 orang (4%), golongan III/b sebanyak 2 orang (8%), golongan III/a sebanyak 2 orang (8%) dan golongan IX sebanyak 11 orang (44%).

D. ISU-ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan, sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi;
2. Realisasi anggaran khususnya pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional yang tidak mencapai target,

- dikarenakan pihak penyedia yang terlambat dalam menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban dan administrasi lainnya;
3. Data dukung dari bidang yang belum maksimal;
 4. Pengisian formulir evaluasi yang belum maksimal;

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA

Visi ini bermakna bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang terus berbenah menjadi lebih maju pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaaan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya didalamnya.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 melaksanakan misi ke-1 (M1) dan ke-6 (M5) yaitu

MISI KE-1 : “MENINGKATKAN SUMBER DAYA YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”

MISI KE-6 : “MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERSIH MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL”

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur adalah : “Meningkatkatnya kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi”. Dengan indikator tujuan yaitu Indeks kerukunan umat beragama (IKUB).

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu / tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah
2. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
3. Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, kepala OPD dengan sekretaris dan kepala bidang, dan seterusnya sampai kelevel jabatan pelaksana sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada	80,35%
3.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	52%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,00 (BB)

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV
Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sekretaris			
I	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100%
1.	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik	ketercapaian target kinerja perangkat daerah(%)	100%
2.	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana (%)	95%
3.	Terlaksananya administrasi BMD sesuai standar	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik (%)	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar (%)	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu (%)	100%
6.	Tersedianya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	100%
7.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan (%)	100%
8.	Terpeliharanya BMD PD dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala (%)	100%
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%) Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100% 100%
1.1	Terlaksananya kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah (%)	
1.2.1	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun (dokumen)	1 Dokumen
1.2.2	Terlaksananya Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, PERwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, PERwakilan dan partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	52 orang
1.2.3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, PERwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, PERwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta pemantauan Situasi Politik di Daerah (laporan)	4 Laporan
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdaftar setiap tahun (%)	100%
2.1	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi ormas/Rumah Ibadah/Kelompok	Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdaftar setiap tahun (Kelompok)	108 Kelompok
2.2.1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0 Orang

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.2.2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah (laporan)	4 Laporan
Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
I.	Meningkatnya nilai - nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan (%)	100%
1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (Orang)	30 Orang
1.2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka (Orang)	70 Orang
2.	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi, social dan budaya yang Dilaksanakan (%)	100%
2.1.	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya (%)	100%
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, social budaya dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (Orang)	575 Orang
2.1.2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pleaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pleaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4 laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	87%
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social (%)	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (Orang)	164 orang
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (Laporan)	4 Laporan
1.1.3.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 Dokumen

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen
4.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Tersediananya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	24 Orang/Bulan
6.	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
1.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	4 laporan
2.	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dokumen)	4 dokumen
3.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	5 Orang
4.	Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket
5.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	11 paket
6.	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket
7.	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket
8.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	60 Dokumen
9.	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	4 laporan
10.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12 laporan
11.	Tersedianya kendaraan dinas / operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	3 Unit
12.	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Paket)	10 paket
13.	Tersedianya peralatan/mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	3 Unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0 Unti
15.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	4 laporan
16.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	4 Laporan
17.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	4 Laporan
18.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	4 Unit
19.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	36 Unit
20.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit
21.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV ini merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati. Pengukuran kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Realisasi
1.	Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%	72,72%
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada	80,39%	80,39%
3.	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan daerah	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	52%	54,48%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,00 (BB)	78,65 (BB)

SASARAN - 1
“ MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH “

➤ ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI
(TRIWULAN IV)

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN 4	REALISASI TRIWULAN 4	PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD	18,18%	72,72%	72,72%	400%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD pada tahun 2025 ditetapkan dengan target tahunan sebesar 18,18% sebagai upaya mendukung terwujudnya stabilitas dan kondusivitas daerah. Pada Triwulan IV, target penurunan konflik ditetapkan sebesar 18,18% dan realisasi yang dicapai sebesar 72,72%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 400%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa jumlah konflik yang terjadi dapat ditekan secara signifikan dibandingkan tahun dasar

Formula mengukur capaian kinerja Indikator “Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD yaitu :

$$\text{Persentase Penurunan Konflik (\%)} = \frac{K_0 - K_t}{K_0} \times 100\%$$

Keterangan :

- K_0 = Jumlah konflik pada tahun dasar
- K_t = Jumlah konflik pada tahun berjalan

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase Penurunan Konflik} &= (11 \text{ Konflik} - 3 \text{ Konflik}) \\
 &/ 11 \text{ Konflik} \times 100\% \\
 &= 8 \text{ Konflik} / 11 \text{ Konflik} \times 100\% \\
 &= 72,72\%
 \end{aligned}$$

Pada periode yang dianalisis, jumlah konflik menurun dari 11 kasus menjadi 3 kasus. Ketiga konflik yang terjadi adalah permasalahan terkait Tana Malea di Kecamatan Towuti, permasalahan terkait PT. Sindoka di Desa Kasintuwu, dan permasalahan terkait PTPN Mantadulu di Kecamatan Angkona.

meskipun indikator penurunan konflik bersifat dinamis dan fluktuatif serta dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kendali langsung perangkat daerah. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pemantauan kondisi sosial politik, penguatan deteksi dini konflik, fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik, serta koordinasi yang intensif dengan Forkopimda, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui langkah-langkah antisipatif dan responsif yang dilakukan secara berkelanjutan, stabilitas dan kondusivitas wilayah dapat terjaga dengan baik.

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGAT DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Selanjutnya, target dan realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya stabilitas dan kondusifitas daerah dengan indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD tahun 2025 (triwulan 4) dengan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Triwulan IV)
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH	PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD	2023	0	0	0
		2024	0	0	0
		2025	18,18%	72,72%	400%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan IV dengan tahun-tahun sebelumnya pada sasaran *Meningkatnya Stabilitas dan Kondusivitas Daerah* melalui indikator *Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD* menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 indikator tersebut belum dijadikan sebagai sasaran strategis, sehingga target dan realisasi kinerja belum ditetapkan. Indikator ini mulai ditetapkan sebagai sasaran strategis pada tahun 2025 dengan target penurunan konflik sebesar 18,18%, yang ditetapkan berdasarkan kondisi tahun dasar serta dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Realisasi yang dicapai sebesar 72,72%, sehingga capaian kinerja mencapai 400%, yang menunjukkan bahwa tingkat konflik yang terjadi dapat ditekan secara signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan deteksi dini konflik, pemantauan kondisi sosial politik, fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik, serta koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, Forkopimda, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait. Upaya pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi dialog dan mediasi masyarakat, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (TRIWULAN 4) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN I : MENINGKATNYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS DAERAH					% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA SASARAN “PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD” :	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TW-4 TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	18,18%	72,72	72,27	63,64	114,26%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 (Triwulan IV) dengan target jangka menengah menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan data tabel, target kinerja tahun 2025 (Triwulan IV) untuk indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD ditetapkan sebesar 18,18%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 72,72%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 400%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 63,64%, realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian konflik yang dilaksanakan berjalan efektif, meskipun indikator ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi sosial politik yang bersifat fluktuatif. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.6
Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN I : Meningkatnya Stabilitas dan kondusivitas daerah				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : “Percentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TW-4 TAHUN 2025 (%)	REALISASI NASIONAL ATAU DAERAH LAIN
	18,18	72,72	72,72	TIDAK ADA

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD dengan target nasional maupun capaian daerah lain belum dapat dilakukan secara langsung karena belum tersedianya indikator yang terstandar dan seragam pada tingkat kabupaten/kota, serta adanya perbedaan metodologi penghitungan dan karakteristik konflik di masing-masing daerah. Namun demikian, realisasi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sebesar 72,72% menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan, serta secara substantif sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial sebagai prasyarat pembangunan daerah.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD jika mengacu pada pencapaian tahun 2025 yaitu :

- a. Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam pemantauan kondisi sosial politik serta pencegahan konflik secara berkelanjutan;
- b. Penguatan sistem deteksi dini konflik melalui pemetaan potensi konflik dan respons cepat terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat;
- c. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang efektif antara Kesbangpol, perangkat daerah terkait, Forkopimda, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan konflik

- melalui fasilitasi dialog, mediasi, dan pendekatan persuasif di tingkat masyarakat
- e. Kondisi konflik yang bersifat fluktuatif namun dapat dikendalikan secara efektif melalui langkah antisipatif dan koordinatif yang tepat

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Kondisi sosial politik yang dinamis dan bersifat fluktuatif.
- b. Potensi konflik dipengaruhi faktor eksternal di luar kewenangan Kesbangpol.
- c. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang belum merata.
- d. Data dan informasi konflik antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi.
- e. Koordinasi lintas sektor memerlukan waktu dan penyesuaian.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
- g. Luas wilayah dan keragaman karakteristik daerah.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Penguatan deteksi dini dan pemantauan potensi konflik.
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
- c. Fasilitasi dialog dan mediasi dalam pencegahan konflik sosial.
- d. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- e. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah..

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi

yang intensif dengan forum-forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 4	Realisasi Tw. 4	Capaian	Anggaran s/d Tw. 4	Realisasi s/d Tw.4	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Stabilitas dan kondusivitas daerah		Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	18,18%	72,72%	400%	3.652.431.400	3.478.607.731	95,24
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100%	100%	100%	1.642.396.800	1.561.725.081	95.09
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan (%)	100%	100%	100%	577.235.000	549.798.450	95.25%
	3. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	100%	100%	100%	1.432.799.600	1.367.084.200	95.41%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Stabilitas dan Kondusivitas Daerah	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	72,72%	95,24	4,76%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD” adalah 4,76%

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguanan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan Program Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kecintaan terhadap tanah air.

Sasaran program adalah Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Indicator program yaitu Persentase Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penguanan Ideologi Pancasila (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Peserta yang Meningkat Pemahamannya}}{\text{Jumlah Peserta yang Disasar}} \times 100\% \\
 &= \frac{100 \text{ Orang}}{100 \text{ Orang}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase Penguatan Ideologi Pancasila diukur dengan membandingkan jumlah peserta yang mengalami peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan jumlah peserta yang disasar. Pada tahun 2025, kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara yang diikuti 30 orang serta kegiatan pembentukan Paskibraka yang diikuti 70 orang, sehingga total peserta yang disasar sebanyak 100 orang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara. Dengan demikian, capaian Persentase Penguatan Ideologi Pancasila mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

- 1.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Dengan indicator kinerja yaitu "Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \\
 &\times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada triwulan 4 terealisasi sesuai dengan target dengan capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yaitu Pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Bela Negara

1. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Sosialisasi dan rapat koordinasi Forum Bela Negara)
2. Peringatan Hari Bela Negara

Dokumentasi kegiatan



1.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dengan indicator kinerja

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan Target Kinerja Tahun 2025 sebanyak 30 orang. Pada Triwulan 1,2 dan 3 kegiatan ini belum ditargetkan. Triwulan 4 di targetkan 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang sehingga capaian kinerja 100%.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta Koordinasi (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	-	-	-	30 Orang
2.	Realisasi	-	-	-	30 Orang
3.	Capaian	-	-	-	100%

1.1.2. Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paskibraka (orang). Target Kinerja Tahun 2025 sebanyak 70 orang PASKIBRAKA.

Pada triwulan 1 dan 2 belum ditargetkan namun proses seleksi PASKIBRAKA Tahun 2025 telah dimulai yaitu sosialisasi; seleksi administrasi dan seleksi akademik, seleksi Kesehatan, seleksi parade dan jasmani serta tes wawancara. Pada tw-3 di targetkan 70 orang PASKIBRAKA, dan terealisasi 70 orang atau capaian 100%. Untuk Triwulan 4 sudah tidak di targetkan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah paskibraka (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	-	-	70 Orang	-
2.	Realisasi	-	-	70 Orang	-
3.	Capaian	-	-	100%	-

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan indikator Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan..

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang EKOSOSBUD (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Kebijakan yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang Ditargetkan}} \times 100\% \\ &= \frac{2 \text{ Kebijakan}}{2 \text{ kebijakan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada Triwulan IV, pelaksanaan kebijakan di bidang EKOSOSBUD difokuskan pada kebijakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi P4GN serta kebijakan penguatan kerukunan umat beragama melalui rapat kerja dan evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Seluruh kebijakan yang ditargetkan pada periode tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana dan berjalan efektif, sehingga mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika serta terpeliharanya kerukunan antarumat beragama, dengan capaian Persentase 100%.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut

2.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya

Indicator kegiatan Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan EKOSOSBUD (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada Triwulan IV, pembinaan dan pengembangan ketahanan EKOSOSBUD dilaksanakan melalui dua kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta rapat kerja dan evaluasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memenuhi target output yang ditetapkan, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan sama dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan EKOSOSBUD pada Triwulan IV mencapai 100 persen dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif, terukur, dan akuntabel.

Dokumentasi kegiatan



Dokumentasi : Kegiatan Sosialisasi P4GN



Dokumentasi : Kegiatan Rapat Kerja dan Evaluasi FKUB

2.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Indicator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

Pada triwulan 4 ditargetkan 200 orang peserta koordinasi, Terealisasi 100%. Selain itu, telah dilaksanakan 143 orang mengikuti coaching pendahuluan IKUB, 100 orang mengikuti expose final IKUB; 47 orang mengikuti rapat kerja FKUB; dan 50 orang yang mengikuti rapat evaluasi program FKUB) yang baru terlaksana pada triwulan 4, sehingga capaian kinerja 270%..

Secara kumulatif, capaian kinerja sampai Triwulan IV mencapai 100% dari target tahunan

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta koordinasi (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	47 orang	193 Orang	135 orang	200 Orang
2.	Realisasi	0 Orang	0 Orang	35 Orang	540 orang
3.	Capaian	0%	0%	26%	270%

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan. Capaian kinerja pada triwulan 4 sebesar 100% dengan jumlah kejadian dan konflik yang terselesaikan sebanyak 20 kasus.

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%) = Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terselesaikan Dibagi Jumlah Konflik dan Kejadian yang Terdata X 100%

$$= 20 \text{ Kasus yang terselesaikan} / 20 \text{ kasus yang terdata} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada Triwulan IV, persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan dihitung berdasarkan 20 kasus konflik dan kejadian yang terdata, dan seluruhnya dapat diselesaikan. Dengan demikian, capaian indikator pada Triwulan IV mencapai 100 persen dan menunjukkan penanganan konflik berjalan efektif dan tepat waktu

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut

3.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Pada triwulan 4 terealisasi 100% dari target 100%.

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (%) = Jumlah Kegiatan yang terlaksana dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan X 100%

$$= 2 \text{ Kegiatan} / 2 \text{ kegiatan} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik diukur dari pelaksanaan dua kegiatan yang direncanakan, yaitu rapat evaluasi tim deteksi dini dan kegiatan pemantauan situasi daerah. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga capaian indikator mencapai 100 persen dan menunjukkan pelaksanaan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik berjalan efektif.

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi : Kegiatan Rapat Kerja Tim Deteksi Dini



Dokumentasi : Kegiatan Pemantauan Aksi Demontrasi

3.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sasaran sub kegiatan tercapai melalui terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing, fasilitasi kelembagaan kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator kinerja berupa jumlah peserta koordinasi terealisasi 100 persen sesuai target, yaitu sebanyak 52 orang yang mengikuti rapat evaluasi Tim Deteksi Dini, yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi berjalan efektif dan sesuai perencanaan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah Peserta koordinasi (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	0 Orang	52 Orang	60 Orang	52 Orang
2.	Realisasi	0 Orang	0 Orang	60 Orang	52 Orang
3.	Capaian	0%	0%	100%	100%

3.1.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pada Triwulan IV, kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik terealisasi sebanyak 1 laporan dari target Triwulan IV sebesar 1 laporan, sehingga capaian kinerja Triwulan IV mencapai 100 persen. Dengan realisasi tersebut, capaian kinerja secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 4 laporan atau 100 persen dari target tahunan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini serta penanganan konflik di daerah (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

3.1.3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten / kota. Dengan indicator jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota. Pada Triwulan IV, pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota menghasilkan 1

dokumen laporan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja Triwulan IV mencapai 100 persen dan secara kumulatif telah memenuhi target tahunan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

SASARAN – 2

“MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA”

Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada dengan indicator sasaran yaitu tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan PEMILU dan PILKADA sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI (TRIWULAN IV)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN 4	REALISASI TRIWULAN 4	PERSENTASE CAPAIAN
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	Tidak ditargetkan	-	-

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa Indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada beserta target tahunannya ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu 80,35% yang mengacu pada capaian realisasi rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serupa dengan tahun 2024. Mengingat indikator ini bersifat periodik dan pengukurannya bergantung pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, maka pada Triwulan IV belum dilakukan pengukuran realisasi pada tahun berjalan. Oleh karena itu, realisasi kinerja masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sampai dengan tersedianya data resmi hasil Pemilu atau Pilkada berikutnya.

Formula mengukur capaian kinerja Indikator “Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada” yaitu :

$$\text{TPPM} (\%) = \frac{\text{TPP Pemilu} + \text{TPP Pilkada}}{2}$$

Keterangan :

TPPM = Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

TPP Pemilu = Tingkat partisipasi PEMILU

TPP Pilkada = Tingkat partisipasi PILKADA

$$\text{TPPM} = (82,39\% + 78,30\%) / 2$$

$$\text{Realisasi} = 80,35\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.

**Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(PILEG dan PILPRES) Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

**Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur)**

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.398	19.881	308	20.189	79,49
2	Wotu	24.373	19.643	268	19.911	81,69
3	Tomoni	19.686	15.778	213	15.991	81,23
4	Tom-Tim	10.277	8.154	144	8.298	80,74
5	Mangkutana	16.537	12.456	169	12.625	76,34
6	Kalaena	9.067	7.221	117	7.338	80,93
7	Angkona	18.365	14.647	281	14.928	81,29
8	Malili	31.499	25.036	225	25.261	80,20
9	Wasuponda	15.853	11.904	142	12.046	75,99
10	Towuti	33.549	25.460	270	25.730	76,69
11	Nuha	17.416	11.452	173	11.625	66,75
Total		222.020	171.632	2310	173.942	78,30

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Triwulan IV)
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Tingkat partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	2023	79,18	79,18	100%
		2024	80,05	80,35	100,37%
		2025	80,35	80,35	100%

Dari table diatas dapat dijelaskan Indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada menunjukkan perkembangan kinerja yang positif dan konsisten dalam mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pada Tahun 2023, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 79,18% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menjadi dasar (baseline) dalam perencanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi di daerah.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif serta Pilkada Serentak menjadi momentum penting dalam pengukuran indikator ini. Realisasi tingkat partisipasi pemilih mencapai 80,35%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,37%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya pembinaan politik, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan mengacu pada hasil pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yaitu sebesar 80,35 persen. Dengan realisasi yang juga mengacu pada capaian tersebut, kinerja Tahun 2025 mencapai 100% dan menunjukkan

terjaganya konsistensi partisipasi politik masyarakat meskipun tidak terdapat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada pada tahun berjalan.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (TRIWULAN 4) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA					% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	80,35	80,35	TIDAK DITARGETKAN	81,50	98,58%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja Sasaran II Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Target dan realisasi Tingkat Partisipasi Pemilih pada Tahun 2025 masing-masing sebesar 80,35%, sehingga capaian kinerja tahunan tercapai 100%. Pada Triwulan IV Tahun 2025 indikator ini tidak ditargetkan karena pengukurannya bersifat periodik dan bergantung pada pelaksanaan Pemilu atau Pilkada.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 81,50%, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 98,58%. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target jangka menengah, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target akhir Renstra, khususnya melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi demokrasi masyarakat, serta sinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau

realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN II : MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : “TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DAN PILKADA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025	REALISASI DAERAH LAIN
	80,35	80,35	TIDAK DITARGETKAN	79,79%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2025 sebesar 80,35 persen, telah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai tersebut bersumber dari hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, mengingat indikator ini bersifat periodik dan tidak ditargetkan per triwulan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Luwu Utara yang tercatat sebesar 79,79 persen, capaian Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Luwu Timur relatif lebih baik dibandingkan daerah pembanding, serta mengindikasikan efektivitas upaya pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada yaitu :

- Menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- b. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melalukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- b. Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik dimasyarakat;
- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. 4	Realisasi TW. 4	Capai an	Anggaran s/d Tw. 4	Realisasi s/d tw-4	Capaia n
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	Tidak ditargetkan	-	-	1,238,202,265	1,230,452,775	99,37%
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100%	0%	0%	1,238,202,265	1,230,452,775	99,37%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	80,35	99,37	0,63

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator "Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA " adalah 0,63%

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya etika dan budaya politik. Program ini memiliki 2 (dua) indicator kinerja yaitu :

1. Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah dana
2. Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat

Pada triwulan 4, program ini hanya menargetkan kinerja pada indicator *Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat*. Dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%. Sedangkan indicator *Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah dana*. Ditargetkan pada triwulan 2 dan terealisasi 100%

Adapun Formula untuk indicator Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Pemahaman (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Peserta yang Meningkat Pemahamannya}}{\text{Jumlah Peserta yang Disasar}} \times 100\% \\ &= 150 \text{ Orang} / 150 \text{ Orang} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator	Persentase	Peningkatan	Pemahaman
digunakan untuk menilai		efektivitas	kegiatan

pendidikan politik dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta yang disasar sebanyak 150 orang mengalami peningkatan pemahaman, sehingga capaian indikator mencapai 100 persen, yang dihitung dari perbandingan jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dengan jumlah peserta yang disasar.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, baik dari aspek materi maupun metode penyampaian. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik, proses demokrasi, serta pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada telah tercapai.

Dampaknya diharapkan mampu mendorong partisipasi politik yang lebih sadar dan berkualitas, memperkuat budaya demokrasi, serta menciptakan iklim politik yang kondusif dan berkelanjutan di daerah.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

- 1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur akan pentingnya pendidikan politik dimasyarakat.

Dengan indicator kinerja yaitu Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Pelaksanaan Dibidang Politik (\%)} &= \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{2 \text{ kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase Capaian Pelaksanaan di Bidang Politik mencapai 100 persen, yang dihitung dari terlaksananya 2 kegiatan dari 2 kegiatan yang direncanakan. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi pendidikan politik dan pemantauan situasi politik daerah, yang seluruhnya telah dilaksanakan sesuai rencana. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di bidang politik berjalan optimal dan efektif dalam mendukung peningkatan pemahaman politik masyarakat serta menjaga stabilitas dan kondusivitas politik di daerah.

1.1.1. Sub kegiatan : Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target Kinerja sub kegiatan untuk Tahun 2025 hanya 1 dokumen yang disusun tepat waktu. Pada Tw-4 tidak di targetkan. Namun Terealisasi 1 dokumen yaitu tersusunnya 1 dokumen program kerja dibidang politik .

Secara kumulatif, capaian kinerja sampai Triwulan IV mencapai 100% dari target tahunan

Formula menghitung capaian kinerja adalah :

Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
2.	Realisasi	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan
3.	Capaian	0%	0%	0%	0%

1.1.2. Sub kegiatan : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan mencakup terlaksananya kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pilkada, serta pemantauan situasi politik di daerah. Pada Triwulan III, sub kegiatan ini tidak memiliki target kinerja, namun terlaksana Rapat Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan partisipasi 52 peserta, yang merupakan realisasi dari target Triwulan II. Untuk Triwulan IV, kegiatan ini tidak ditargetkan.

Secara kumulatif, capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 100 persen dari target tahunan, menunjukkan pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai rencana dan efektif dalam mendukung sasaran tahunan.

Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah :

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	0 Orang	52 Orang	0 Orang	0 Orang
2.	Realisasi	0 Orang	0 Orang	52 Orang	0 Orang
3.	Capaian	0%	0%	0%	0%

1.1.3. Sub kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan mencakup terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pilkada, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk setiap triwulan (I s.d. IV) adalah 1 laporan, dan seluruhnya terealisasi sesuai target.

Secara kumulatif, capaian kinerja hingga Triwulan IV mencapai 100 persen dari target tahunan, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan konsisten dan efektif dalam mendukung sasaran tahunan.

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memastikan terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, demokrasi, kelembagaan pemerintahan, partai

politik, Pemilu/Pilkada, dan situasi politik daerah, terkait perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan di daerah. Dalam hal ini pelaksanaan evaluasi perkembangan politik di daerah dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemantauan secara langsung di lapangan terhadap isu-isu atau kerawanan politik yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan. Berikut data pemantauan situasi politik di daerah

Tabel 3.
Data Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Kecamatan	Penjelasan
1.	Nuha	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
2.	Towuti	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
3.	Wasuponda	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
4.	Malili	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
5.	Angkona	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
6.	Kalaena	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
7.	Mangkutana	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
8.	Tomoni	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
9.	Tomoni Timur	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
10.	Wotu	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
11.	Burau	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri

SASARAN – 3

“MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH“

Sasaran Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah dengan indicator kinerja persentase peran ormas dalam pembangunan daerah. Indikator ini digunakan untuk menilai kontribusi ormas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Capaian indikator menunjukkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Hasil capaian ini mencerminkan tingkat partisipasi ormas dalam

pembangunan daerah serta menjadi acuan penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan daerah.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI (TRIWULAN IV)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN 4	REALISASI TRIWULAN 4	PERSENTASE CAPAIAN
persentase peran ormas dalam pembangunan daerah	52%	52%	54,48%	104,76

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa Indikator kinerja persentase peran organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan daerah pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 54,48 persen, melebihi target Triwulan IV yang ditetapkan sebesar 52 persen, sehingga persentase capaian mencapai 104,76 persen.

Data tersebut didukung oleh jumlah ormas terdaftar sebanyak 290, dengan 158 ormas aktif yang secara nyata berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap ormas, serta menunjukkan bahwa keterlibatan ormas dalam mendukung pembangunan daerah lebih tinggi dari yang direncanakan, sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

Formula mengukur capaian kinerja yaitu :

$$\text{Persentase Ormas (\%)} = \frac{\text{ORMAS AKTIF}}{\text{ORMAS TERDAFTAR}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ORMASAKTIF = Jumlah keseluruhan ormas yang aktif dalam pembangunan
- ORMASTERDAFTAR = Jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan memiliki SKT/terverifikasi pada pemerintah

daerah melalui Badan Kesbangpol.

$$\text{Percentase Ormas (\%)} = 158 \text{ Ormas} / 290 \text{ Ormas} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 54,48\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 104,76$$

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGAT DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV DENGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 (Triwulan IV)
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dslam Pembangunan Daerah	Percentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	2023	Belum ditargetkan	0	0
		2024	Belum ditargetkan	0	0%
		2025	52%	54,48	104,76%

Dari table diatas dapat dijelaskan Indikator persentase peran Ormas dalam pembangunan daerah merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini belum ditargetkan sehingga realisasinya tercatat 0%, menandakan bahwa pengukuran formal terhadap peran Ormas belum dilakukan sebelumnya.

Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 52% dan realisasi mencapai 54,48%, sehingga capaian melebihi target sebesar 104,76%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator baru, partisipasi Ormas dalam pembangunan daerah sudah cukup signifikan, dan pelaksanaan program pembinaan serta pemberdayaan Ormas telah berhasil mendorong keterlibatan aktif mereka. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian 2025 menjadi titik awal yang positif untuk mengukur dan meningkatkan peran Ormas di masa mendatang.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (TRIWULAN 4) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DSLAM PEMBANGUNAN DAERAH					% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR KINERJA SASARAN : “PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	52	54,48	52	61	89,31%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi kinerja indikator “Percentase Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah” pada tahun 2025 mencapai 54,48%, melebihi target tahunan yang ditetapkan sebesar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pemberdayaan Ormas dalam pembangunan daerah telah berjalan efektif dan menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, yakni 61%, capaian hingga tahun 2025 sebesar 54,48% telah mencapai 89,31% dari target akhir. Artinya, dalam waktu satu tahun, indikator baru ini telah berhasil mendekati capaian jangka menengah, menunjukkan progres positif yang solid dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan peran Ormas pada tahun-tahun berikutnya.

4. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN III : MENINGKATNYA PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : “PERSENTASE PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH”	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025	REALISASI DAERAH LAIN
	52%	54,48	54,48	Tidak Ada

Indikator “Persentase Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah” di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 54,48%, sedikit melebihi target tahunan 52%. Hingga saat ini, belum terdapat data nasional atau perbandingan resmi dari daerah lain terkait indikator serupa, sehingga capaian Luwu Timur belum bisa dibandingkan secara kuantitatif dengan daerah lain atau target nasional.

Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah berhasil mendorong partisipasi Ormas secara signifikan, dan capaian 54,48% ini dapat dijadikan baseline awal untuk pengukuran partisipasi Ormas di masa mendatang. Kondisi ini juga menegaskan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan Ormas di Luwu Timur telah berjalan efektif meskipun indikator ini masih baru dan belum ada standar pembanding dari daerah lain.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indicator Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah yaitu :

- Pembinaan dan koordinasi rutin oleh Kesbangpol.
- Program pemberdayaan Ormas yang terstruktur.
- Peningkatan kesadaran Ormas dan masyarakat.
- Dukungan administratif dari pemerintah daerah.
- Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keterlibatan Ormas.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- Keterbatasan kapasitas Ormas – SDM dan sumber daya yang

terbatas.

- b. Koordinasi yang belum merata – Beberapa Ormas kurang terintegrasi dalam program pembangunan.
- c. Kesadaran partisipasi berbeda – Tidak semua Ormas termotivasi untuk aktif.
- d. Kendala administratif – Proses pendaftaran atau perizinan masih menjadi hambatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Sosialisasi – Meningkatkan kesadaran Ormas melalui sosialisasi dan rapat koordinasi
- b. Fasilitasi Administratif – Mempermudah proses pendaftaran, dan akses informasi bagi Ormas.
- c. Monitoring dan Evaluasi – Melakukan pemantauan berkala untuk menyesuaikan strategi dan memastikan partisipasi Ormas efektif

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. 4	Realisasi Tw. 4	Capai an	Anggaran s/d Tw. 4	Realisasi s/d tw-4	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah		Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	52%	54,48%	104,76	77,664,400	66,888,500	86.13
	1. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100%	100%	100%	77,664,400	66,888,500	86.13

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah	54,48%	86,13%	13,87

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “Persentase Peran Ormas Dalam Pembangunan Daerah ” adalah 13,87%

7. ANALISIS PROGAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran program yaitu Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan. Dengan indicator Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun. Sampai pada triwulan 4 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100% Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok } (\%) &= \frac{\text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang Terdaftar}}{\text{Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok yang terdata}} \times 100\% \\ &= 155 \text{ Kelompok terdaftar} / 155 \text{ Kelompok terdata} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase Ormas, rumah ibadah, dan kelompok masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Luwu Timur mencapai 100%, karena seluruh 155 kelompok yang terdata telah resmi terdaftar. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan registrasi kelompok masyarakat telah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga tidak ada kelompok yang terlewat. Kondisi ini sangat penting karena pendaftaran resmi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pemberdayaan Ormas maupun kelompok lainnya secara lebih efektif. Selain itu, data yang lengkap memudahkan pemerintah dalam perencanaan program pembangunan, penyaluran bantuan, serta pengawasan kegiatan, sehingga keterlibatan Ormas dan kelompok masyarakat dalam pembangunan daerah dapat lebih optimal. Pencapaian 100% ini juga menjadi indikator bahwa keterlibatan seluruh kelompok masyarakat di Luwu Timur dalam sistem administrasi resmi telah terjamin, sebagai langkah awal yang kuat untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi ormas/rumah ibadah/kelompok. Sampai pada Triwulan 4 jumlah ormas/rumah ibadah/kelompok yang terdaftar sebanyak 155 kelompok, dengan target yang hanya 108 kelompok atau capaian 143,51%. Hal ini juga dipengaruhi tingginya minat kelompok masyarakat, seperti rumah ibadah, kelompok tani, nelayan, dan lembaga lain, untuk mendaftar agar memperoleh bantuan atau hibah dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sistem pendaftaran berjalan efektif dan membantu penyaluran dukungan secara tepat sasaran.

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar = Jumlah Ormas/Rumah Ibadah/Kelompok terdaftar pada tahun berjalan
Realisasi = 155 Kelompok
Capaian = 143,51%

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Ormas/LSM/Klp Tani/Rumah Ibadah



1.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Sasaran Sub kegiatan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Pada triwulan 1,2,3 dan 4 ditargetkan masing-masing 1 laporan dan terealisasi sesuai dengan target. Secara kumulatif, capaian kinerja sampai Triwulan IV mencapai 100% dari target tahunan

Formula mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun tepat waktu (T_w-n)

**Table
Capaian Kinerja**

No	Uraian	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Target	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

SASARAN 4

“ MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH “

➤ **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan termasuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan utama dari peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya pelayanan SKPD, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, ditetapkan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja SKPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya menunjukkan kinerja organisasi yang terukur, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUNINI (TRIWULAN 4)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN 4	REALISASI TRIWULAN 4	PERSENTASE CAPAIAN
Nilai Sakip	70,00	70,00	78,65	112,35%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Capaian indikator Nilai SAKIP untuk Sasaran Strategis IV pada Triwulan 4 Tahun 2025 tercatat 78,65, melebihi target tahunan sebesar 70, sehingga persentase capaian mencapai 112,35%. Perlu dicatat bahwa data realisasi ini masih menggunakan data tahun 2024, sehingga angka tersebut mencerminkan kondisi terakhir yang terdokumentasi hingga akhir 2024.

Meskipun demikian, pencapaian di atas target menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD. Hasil ini menjadi indikator positif bahwa SKPD telah menjalankan tata kelola pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi dasar bagi upaya peningkatan Nilai SAKIP yang lebih akurat ketika data tahun 2025 resmi tersedia.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJATAHUNINI DENGANTAHUN LALU DAN BEBERAPATAHUN TERAKHIR

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2023	69	77,95	BB	112,97
		2024	77,95	78,95	BB	101,28
		2025	70	78,65	BB	112%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023, nilai SAKIP tercatat 77,95 dengan capaian 112,97% dari target 69 (kategori BB), menunjukkan kinerja yang melebihi target awal. Tahun 2024 meningkat menjadi 78,95 dengan capaian 101,28% dari target 77,95, tetap berada pada kategori BB dan menegaskan stabilitas kinerja. Untuk 2025, realisasi masih mengacu pada data tahun 2024 sebesar 78,65, sehingga capaian tercatat 112% dari target 70 (kategori BB), menggambarkan konsistensi kinerja yang baik meskipun evaluasi resmi tahun berjalan belum dilakukan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah

SASARAN IV: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH					% CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2029
INDIKATOR SASARAN : KINERJA SAKIP	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI TAHUN 2025 (%)	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2029 (%)	
	70 (BB)	78,65	78,65	72,50 (BB)	108,48

Realisasi indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 tercatat 78,65, melebihi target tahunan 70, sehingga capaian Triwulan 4 mencapai 112,35%. Data ini masih

Menggunakan realisasi tahun 2024, karena evaluasi resmi untuk tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai tim evaluator belum dilakukan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2029 sebesar 72,50, capaian tahun 2025 telah mencapai 108,48%, menunjukkan bahwa SKPD sudah melampaui target jangka menengah lebih awal. Hal ini menandakan peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan, efektifitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai SAKIP ketika evaluasi resmi tahun 2025 selesai dilakukan..

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Tabel 3.

Perbandingan dengan Target Nasional/Daerah Lain

SASARAN IV : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "NILAI SAKIP	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN 4 TAHUN 2025	REALISASI DAERAH LAIN
	70%	78,65	78,65	73,06

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran IV menekankan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP. Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 70%, sedangkan realisasi masih menggunakan data tahun 2024, yaitu 78,65%, termasuk triwulan 4. Capaian ini sudah melebihi target awal sebesar 8,65 poin, menandakan kinerja perangkat daerah tetap baik meskipun evaluasi resmi tahun 2025 belum dilakukan oleh Inspektorat.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dengan realisasi SAKIP

73,06%, nilai 78,65% menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini lebih tinggi 5,59 poin. Hal ini menegaskan bahwa kinerja Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur berada di atas rata-rata daerah lain dan konsisten mempertahankan kualitas manajemen kinerja yang baik, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi SAKIP dibandingkan OPD sejenis.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2025 - 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Evaluasi resmi kinerja tahun berjalan belum dilakukan, sehingga capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya.
2. Pegawai yang terbatas atau kurang pengalaman dalam penyusunan laporan SAKIP dan manajemen kinerja.
3. Terkadang data program/kegiatan belum lengkap atau belum terintegrasi sehingga menyulitkan analisis kinerja secara tepat waktu
4. Pembatasan anggaran untuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau peningkatan kapasitas SDM dapat mempengaruhi pencapaian kinerja

5. Adanya perubahan aturan di tingkat pusat/daerah yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

- Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran – Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas sesuai Rencana Kerja Tahunan, sehingga capaian SAKIP melebihi target.
- Efisiensi Sarana dan Prasarana – Penggunaan sarana kerja, dokumen, dan teknologi informasi difokuskan untuk mendukung pengelolaan kinerja
- Optimalisasi SDM – Pegawai memanfaatkan waktu dan kapasitas kerja secara efektif, dengan penugasan berbasis kompetensi
- Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan – Data dan dokumentasi digunakan untuk evaluasi dan penyesuaian

strategi agar sumber daya diarahkan ke kegiatan yang memberikan hasil optima

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. 4	Realisasi Tw. 4	Capai an	Anggaran Tw. 4	Realisasi	Capaia n
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Nilai Sakip	70	78,65	112%	3,789,876,609	3,610,971,297	95,28
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	100%	98,43%	98,43%	3,789,876,609	3,610,971,297	95,28

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Realisasi Kinerja Tw-4	% Realisasi Anggaran Tw-4	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah yang berjalan sesuai standar(%)	98,43%	95,28%	4,72%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan adalah 4,72%

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada triwulan 4 terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sasaran program yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi. Indicator program adalah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar.

Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan 4 Tahun 2025 adalah yaitu 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penunjang Urusan (\%)} &= \frac{\text{Jumlah kegiatan penunjang sesuai standar}}{\text{Total kegiatan penunjang}} \times 100\% \\ &= 8 \text{ kegiatan} / 8 \text{ Kegiatan} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, persentase kegiatan penunjang urusan mencapai 100%, karena seluruh kegiatan penunjang yang dilaksanakan (8 kegiatan) sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (8 kegiatan dari total 8 kegiatan).

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan seluruh kegiatan penunjang secara lengkap dan sesuai ketentuan, mencerminkan kepatuhan terhadap standar prosedur, efektivitas pengelolaan program, dan optimalisasi peran kegiatan penunjang dalam mendukung pencapaian sasaran utama OPD. Dengan capaian 100%, dapat disimpulkan bahwa semua

kegiatan penunjang berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja keseluruhan

Program ini didukung 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Kinerja (%) = Jumlah Target Kinerja Tercapai Dibagi Jumlah Target Kinerja ditetapkan X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi dengan baik. Hingga Triwulan IV ditargetkan 17 dokumen, dan seluruhnya telah terpenuhi sesuai standar, sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 100%.	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	3 Dok	-	1 Dok	2 Dok	0 Dok	-	1 Dok	2 Dok	0 Dok	-	100%	100%	-	Sasaran kinerja adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan hingga Triwulan IV telah tersusun 3 dokumen perencanaan, yaitu Renja Pokok Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, serta Renstra Tahun 2025–2029	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKP (Dokumen)	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	-	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	100%	100%	-	Sasaran kinerja yaitu tersedianya Dokumen RKA-SKPD serta Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, yang meliputi Dokumen RKA Pokok Tahun 2026 dan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025, yang disusun sesuai	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
																	ketentuan dan mendukung kelancaran proses penganggaran perangkat daerah.)	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKP (Dokumen)	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	-	-	100%	-	-	-	Sasaran kinerja yaitu tersedianya Dokumen DPA-SKPD serta Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, yang meliputi DPA Pokok Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025, disusun sesuai ketentuan dan mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran perangkat daerah	
1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	10 Laporan	4 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	4 Lap	2 lap	2 Lap	2 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah, yang dibuktikan dengan tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan, serta Laporan Evaluasi RKPD Triwulan, sesuai ketentuan yang berlaku.	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	Persentase Realisasi Anggaran (%) = Realisasi Anggaran Dibagi Total Anggaran yang Direncanakan X 100%	95%	20%	45%	75%	95%	21,05	45,62%	65,61	96,48	105%	101	87,48	102	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar. Hingga Triwulan IV, capaian kinerja mencapai 101%, melampaui target yang ditetapkan sebesar	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahuna n	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
																	95%, dengan realisasi sebesar 96,48%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan, dan mendukung kelancaran pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah.	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Org/Bln	17 Org/Bln	17/Orng/bln	17/Orng/bln	24/Org/bln	17 Org/Bln	17 Orng/Bln	17/Orng/bln	24/Org/bln	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, gaji dan tunjangan dibayarkan setiap bulan kepada 17 ASN, sedangkan pada Triwulan IV dibayarkan kepada 24 ASN setiap bulan. Seluruh pembayaran dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Laporan	5 Lap	4 Lap	5 Lap	4 Lp	5 Lap	4 Lap	5 Lap	4 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya Laporan Keuangan SKPD secara bulanan, triwulanan, dan semesteran, serta Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Laporan yang disusun meliputi laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2024, yang diselesaikan sesuai ketentuan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	Persentase Administrasi Aset (%) = Jumlah Aset Teradministrasi Dibagi Jumlah Aset Keseluruhan X 100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Terlaksananya administrasi BMD sesuai standar	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD. Hingga Triwulan IV, target yang ditetapkan adalah 4 laporan penatausahaan	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
																	BMD, dengan penyusunan masing-masing 1 laporan pada setiap triwulan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung tertiib administrasi aset daerah	
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar	Persentase Administrasi Kepegawaian (%) = Jumlah Dokumen Kepegawaian sesuai standar Dibagi Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan X 100%	100%	100%	100%	100%	100	50%	66,67%	100%	100	50%	66,67%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik. Seluruh dokumen kepegawaian dikelola sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga capaian kinerja mencapai 100%, yang menunjukkan tertiib administrasi dan efektivitas pengelolaan kepegawaian perangkat daerah.	
4.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	4 Dokuman	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen pada setiap triwulan, sehingga hingga akhir tahun	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
																	seluruh dokumen dapat diselesaikan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.	
4.2	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	2 Org	3 Org	0	0	0 Org	1 Org	1 Orng	3 org	0%	33,3%	0%	0	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Sebanyak 5 orang ASN telah mengikuti kegiatan bimtek, meliputi bimtek penyusunan Renstra 2025–2029, penatausahaan keuangan, bimtek kepala OPD, bimtek kepegawaian, dan bimtek pelayanan publik, sehingga capaian kinerja tercapai 100%.	
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%) = Jumlah Layanan Administrasi Tepat Waktu Dibagi Jumlah Layanan Administrasi Keseluruhan X 100%	100%	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah. Seluruh layanan administrasi dilaksanakan sesuai standar waktu dan prosedur yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan layanan administrasi umum.	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target yang ditetapkan sebanyak 4 paket, dengan realisasi 4 paket atau capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan secara bertahap dengan masing-masing 1 paket pada setiap triwulan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku		
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 Paket	0 Paket	8 Paket	0 Paket	3 Paket	0 Paket	2 Paket	6 Paket	3 Paket	0%	25%	0%	100	Sasaran kinerja yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi kegiatan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 paket, yang mencakup pengadaan laptop, printer, gorden, dispenser, hard disk, proyektor, mikrofon nirkabel, speaker nirkabel, dan karpet, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100	Sasaran kinerja yaitu tersedianya bahan logistik kantor. Target ditetapkan sebanyak 4	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
		(Paket)															paket dan seluruhnya terealisasi 4 paket atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 1 paket pada setiap triwulan.	
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 paket	1 Paket	-	100%	100%	100%	-	Sasaran kinerja yaitu Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. Target ditetapkan sebanyak 4 paket dan seluruhnya terealisasi 4 paket atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 1 paket pada setiap triwulan.	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target ditetapkan sebanyak 60 dokumen dan seluruhnya terealisasi 60 dokumen atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 15 dokumen pada setiap triwulan.	
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100	100	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Target ditetapkan sebanyak 4 laporan dan seluruhnya terealisasi 4 laporan atau mencapai 100%, dengan realisasi	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
																	masing-masing 1 laporan pada setiap triwulan.	
5.7	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 lap	3 Lap	3 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Target ditetapkan sebanyak 12 laporan dan seluruhnya terealisasi 12 laporan atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 3 laporan pada setiap triwulan	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan (%)	Persentase Kesesuaian (%) = Jumlah Barang sesuai kebutuhan Dibagi Jumlah Barang yang diadakan X 100%	100%	100%	100%	100%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya Barang Milik Daerah pada perangkat daerah. Target ditetapkan sebanyak 16 unit, dengan realisasi 14 unit. Terdapat 2 unit yang belum terealisasi, yaitu kendaraan dinas roda dua, akibat keterlambatan penyelesaian administrasi oleh pihak penyedia. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 87,50%.	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	0 Unit	1 unit	0 Unit	2 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0%	0%	0%	33,33%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan. Dari target 2 unit,	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahuna n	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
		yang disediakan (Unit)															terealisasi 1 unit atau capaian kinerja sebesar 33,33%. Belum terealisasinya 1 unit kendaraan disebabkan oleh keterlambatan proses administrasi dan penyelesaian pengadaan oleh pihak penyedia, sehingga pengadaan belum dapat dituntaskan pada tahun berjalan.	
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	0 unit	10 unit	0 Unit	0 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit	0%	0%	0%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya mebel. Target ditetapkan sebanyak 10 paket mebel dan seluruhnya terealisasi 10 paket atau mencapai 100%, yang meliputi pengadaan kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, meja rapat, meja kerja, lemari arsip, filling cabinet, dan meja komputer	
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	2 unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	0 unit	1 unit	2 Unit	0 unit	0%	0%	100%	100 %	Sasaran kinerja yaitu tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Target ditetapkan sebanyak 3 unit dan seluruhnya terealisasi 3 unit atau mencapai 100%, yang terdiri atas 2 unit AC dan 1 unit tiang bendera.	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan	Persentase Kesesuaian Penyediaan Jasa = Jumlah Jasa Sesuai Kebutuhan Dibagi Jumlah Jasa yang Disediakan X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Target ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya terealisasi 100% atau mencapai capaian 100%, yang meliputi jasa surat menyurat, penyediaan jasa sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, serta jasa keamanan		
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	1 lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Target ditetapkan sebanyak 4 laporan dan seluruhnya terealisasi 4 laporan atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 1 laporan pada setiap triwulan	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target ditetapkan sebanyak 4 laporan dan seluruhnya terealisasi 4 laporan atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 1 laporan pada setiap triwulan	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1 lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor. Target ditetapkan sebanyak 4 laporan dan seluruhnya terealisasi 4 laporan atau mencapai 100%, dengan realisasi masing-masing 1 laporan pada setiap triwulan	
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala(%)	Persentase Pemeliharaan Barang (%) = Jumlah Barang yang Dipelihara Dibagi Jumlah Barang Keseluruhan X 100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	82,05%	100%	100	100%	82,05%	100%	100	Sasaran kinerja yaitu terpeliharanya BMD pada perangkat daerah dengan baik. Target ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya terealisasi 100% atau mencapai capaian 100%, yang meliputi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan dan mesin, bangunan kantor, serta sarana dan prasarana kantor termasuk halaman dan taman	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%	Sasaran kinerja yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan. Target ditetapkan	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahuna n	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
	Dinas Operasional atau Lapangan	pajak dan perizinannya (Unit)															sebanyak 4 kendaraan dan seluruhnya terealisasi 4 kendaraan atau mencapai 100%, yang terdiri dari 1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit	7 unit	13 unit	4 Unit	12 Unit	7 unit	6 unit	4 Unit	12 Unit	100%	100%	100%	100	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Target ditetapkan sebanyak 36 unit dan seluruhnya terealisasi 36 unit atau mencapai 100%, yang meliputi laptop, printer, AC, mesin babat, dan computer	
8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	0 unit	2 unit	0 Unit	0 Unit	0 unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0%	50%	0%	100%	Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Target ditetapkan sebanyak 2 unit dan seluruhnya terealisasi 2 unit atau mencapai 100%, yang meliputi Gedung Kantor Kesbangpol dan Gedung Kantor FKUB	
8.4	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0%	0%	0%	100%	Sasaran kinerja yaitu Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahuna n	Target / Realisasi / Capaian												Keterangan	
					Target				Realisasi				Capaian					
					Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4		
	atau bangunan lainnya	dipelihara/dire habilitasi	dipelihara/direhab ilitasi														Bangunan Lainnya. Ditargetkan 1 unit dan terealisasi 1 unit	

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 8,758,174,674,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 sebesar Rp. 8,386,920,303,- (*delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga rupiah*) atau 95,76% berdasarkan anggaran kas dan 95,76% berdasarkan anggaran tahunan. Terealisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel 3.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	3,789,876,609	3,789,876,609	3,610,971,297	95.28	178,905,312	4.72
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	67,975,803	67,975,803	61,281,024	90.15	6,694,779	9.85
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36,802,500	36,802,500	34,428,124	93.55	2,374,376	6.45
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3,118,000	3,118,000	2,950,000	94.61	168,000	5.39
3.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2,637,500	2,637,500	2,534,500	96.09	103,000	3.91
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25,417,803	25,417,803	21,368,400	84.07	4,049,403	15.93
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,116,351,066	2,116,351,066	2,041,937,340	96.48	74,413,726	3.52
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,067,704,566	2,067,704,566	1,999,487,640	96.70	68,216,926	3.30

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semensteran SKPD	48,646,500	48,646,500	42,449,700	87.26	6,196,800	12.74
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	13,054,000	13,054,000	11,510,630	88.18	1,543,370	11.82
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	13,054,000	13,054,000	11,510,630	88.18	1,543,370	11.82
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	67,783,000	67,783,000	56,238,937	82.97	11,544,063	17.03
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35,257,000	35,257,000	31,555,888	89.50	3,701,112	10.50
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	32,526,000	32,526,000	24,683,049	75.89	7,842,951	24.11
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	545,911,740	545,911,740	526,794,840	96.50	19,116,900	3.50
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20,270,000	20,270,000	20,270,000	100.00	-	0.00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,000,000	188,000,000	185,607,700	98.73	2,392,300	1.27
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	14,289,340	14,289,340	14,289,140	100.00	200	0.00
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,390,000	13,390,000	13,037,260	97.37	352,740	2.63
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,040,000	8,040,000	8,040,000	100.00	-	0.00
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	16,500,000	16,500,000	14,460,000	87.64	2,040,000	12.36
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,422,400	285,422,400	271,090,740	94.98	14,331,660	5.02
6.	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	761,061,000	761,061,000	699,507,320	91.91	61,553,680	8.09
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	638,196,000	638,196,000	583,159,000	91.38	55,037,000	8.62

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2	Pengadaan Mebel	103,865,000	103,865,000	97,471,320	93.84	6,393,680	6.16
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,000,000	19,000,000	18,877,000	99.35	123,000	0.65
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	#DIV/0! !	-	#DIV/0! !
7.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	96,770,000	96,770,000	94,413,821	97.57	2,356,179	2.43
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1,610,000	1,610,000	1,549,254	96.23	60,746	3.77
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33,600,000	33,600,000	32,954,567	98.08	645,433	1.92
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61,560,000	61,560,000	59,910,000	97.32	1,650,000	2.68
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	120,970,000	120,970,000	119,287,385	98.61	1,682,615	1.39
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24,000,000	24,000,000	23,523,585	98.0	476,415	1.99
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	37,970,000	37,970,000	36,954,800	97.33	1,015,200	2.67
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	46,000,000	46,000,000	45,893,000	99.77	107,000	0.23
4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	13,000,000	13,000,000	12,916,000	99.35	84,000	0.65
02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,642,396,800	1,642,396,800	1,561,725,081	95.09	80,671,719	4.91
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,642,396,800	1,642,396,800	1,561,725,081	95.09	80,671,719	4.91

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	31,148,800	31,148,800	23,647,550	75.92	7,501,250	24.08
2	Pembentukan Paskibraka	1,611,248,000	1,611,248,000	1,538,077,531	95.46	73,170,469	4.54
03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,238,202,265	1,238,202,265	1,230,452,775	99.37	7,749,490	0.63
1.	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</i>	1,238,202,265	1,238,202,265	1,230,452,775	99.37	7,749,490	0.63
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	61,121,000	61,121,000	58,178,000	95.18	2,943,000	4.82
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	1,153,922,265	1,153,922,265	1,149,437,845	99.61	4,484,420	0.39

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah	23,159,000	23,159,000	22,836,930	98.61	322,070	1.39
04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	77,664,400	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>	77,664,400	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	77,664,400	77,664,400	66,888,500	86.13	10,775,900	13.87
05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	577,235,000	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	577,235,000	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	577,235,000	577,235,000	549,798,450	95.25	27,436,550	4.75

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1,432,799,600	1,432,799,600	1,367,084,200	95.41	65,715,400	4.59
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	1,432,799,600	1,432,799,600	1,367,084,200	95.41	65,715,400	4.59
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	180,427,600	180,427,600	176,675,200	97.92	3,752,400	2.08
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	29,784,500	29,784,500	29,770,500	99.95	14,000	0.05
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,222,587,500	1,222,587,500	1,160,638,500	94.93	61,949,000	5.07
TOTAL		8,758,174,674	8,758,174,674	8,386,920,303	95.76	371,254,371	4.24

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	3,789,876,609	100	557,020,580	100	661,704,759	100	616,989,435	95	1,767,473,023	98.43	3,610,971,297	98.43%	95.28%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	67,975,803	100	3,500,000	100	12,404,850	100	13,433,924	100	31,158,750	100.00	61,281,024	100.00%	90.15%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	36,802,500	0	3,500,000	1	7,145,200	2	4,901,924	-	18,881,000	3	34,428,124	100.00%	93.55%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2	3,118,000	0	-	1	-	1	-		2,950,000	2	2,950,000	100.00%	94.61%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	2	2,637,500	1	-	-	1,751,000	-		1	783,500	2	2,534,500	100.00%	96.09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	10	25,417,803	4	-	2	3,508,650	2	8,532,000	2	9,327,750	10	21,368,400	100.00%	84.07%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)
			Realisasi Kinerja pada Triwulan											
	daerah													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	2,116,351,066	100	472,311,276	100	536,510,403	100	442,139,204	100	590,976,457	100.00	2,041,937,340	100.00% 96.48%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	2,067,704,566	17	466,611,276	17	525,116,803	17	433,274,204	17	574,485,357	17	1,999,487,640	100.00% 96.70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semensteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semensteran SKPD	18	48,646,500	5	5,700,000	4	11,393,600	5	8,865,000	4	16,491,100	18	42,449,700	100.00% 87.26%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadiministrasi kan sesuai standar	100	13,054,000	100	1,900,000	100	4,091,000	100	2,850,000	100	2,669,630	100.00	11,510,630	100.00% 88.18%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	13,054,000	1	1,900,000	1	4,091,000	1	2,850,000	1	2,669,630	4	11,510,630	100.00% 88.18%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	67,783,000	100	5,200,000	100	11,414,500	100	10,087,700	100	29,536,737	100.00	56,238,937	100.00% 82.97%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4 35,257,000	1 5,200,000	1 9,075,000	1 8,363,700	1 8,917,188	4 31,555,888	100.00%	89.50%				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 32,526,000	0 -	1 2,339,500	1 1,724,000	3 20,619,549	5 24,683,049	100.00%	75.89%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 545,911,740	100 48,012,029	100 100.00	100 55,555,787	100 104,117,826	100 319,109,198	100.00	100.00%	526,794,840	100.00%	96.50%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 20,270,000	1 -	1 6,160,000	1 -	1 14,110,000	4 20,270,000	100.00%	100.00%				100.00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 188,000,000	0 -	2 2,500,000	3 35,620,000	6 147,487,700	11 185,607,700	100.00%	98.73%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 14,289,340	1 -	1 2,945,200	1 4,094,940	1 7,249,000	4 14,289,140	100.00%	100.00 %				
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang	4 13,390,000	1 300,000	1 3,980,000	1 2,440,000	1 6,317,260	4 13,037,260	100.00%	97.37%				

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)
			Realisasi Kinerja pada Triwulan											
	disediakan													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	60	8,040,000	15	1,260,000	15	2,090,000	15	1,940,000	15	2,750,000	60	8,040,000	100.00% 100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	16,500,000	1	2,400,000	1	-	1	5,880,000	1	6,180,000	4	14,460,000	100.00% 87.64%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	285,422,400	3	44,052,029	3	37,880,587	3	54,142,886	3	135,015,238	12	271,090,740	100.00% 94.98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100	761,061,000	0	-	-	-	100	11,877,000	78	680,630,320	87.50	699,507,320	87.50% 91.91%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	638,196,000	0	-	-	-	-	-	1	583,159,000	1	583,159,000	33.33% 91.38%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	103,865,000	0	-	-	-	-	-	10	97,471,320	10	97,471,320	100.00% 93.84%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	19,000,000	0	-	-	-	2	11,877,000	1	7,000,000	3	18,877,000	100.00% 99.35%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	96,770,000	100	16,637,275	100	20,482,219	100	25,303,781	100	31,990,546	100	94,413,821	100.00%	97.57%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1,610,000	1	100,000	1	592,000	1	268,509	1	588,745	4	1,549,254	100.00%	96.23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	33,600,000	1	8,037,275	1	7,140,219	1	8,095,272	1	9,681,801	4	32,954,567	100.00%	98.08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	61,560,000	1	8,500,000	1	12,750,000	1	16,940,000	1	21,720,000	4	59,910,000	100.00%	97.32%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	120,970,000	100	9,460,000	100.00	21,246,000	100	7,180,000	100	81,401,385	100.00	119,287,385	100.00%	98.61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	24,000,000	4	6,400,000	4	6,126,000	4	4,000,000	4	6,997,585	4	23,523,585	100.00%	98.01%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	37,970,000	7	3,060,000	6	2,620,000	4	3,180,000	19	28,094,800	36	36,954,800	100.00%	97.33%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	2	46,000,000	0	-	1	12,500,000	1	-		33,393,000	2	45,893,000	100.00%	99.77%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	13,000,000	0	-	-	-	-	-	1	12,916,000	1	12,916,000	100.00%	99.35%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)							
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												88.77%	95.28%				
				Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100.00	1,642,396,800	100	32,421,516	100	50,427,000	100	936,618,745	100	542,257,820	100	1,561,725,081	100.00%	95.09%						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100	1,642,396,800	100	32,421,516	100	50,427,000	100	936,618,745	100	542,257,820	100	1,561,725,081	100.00%	95.09%						
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhinneka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (orang)	30	31,148,800	-	-	-	1,611,050	-	-	30	22,036,500	30	23,647,550	100.00%	75.92%						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka (orang)	70	1,611,248,000	-	32,421,516	-	48,815,950	70	936,618,745		520,221,320	70	1,538,077,531	100.00%	95.46%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00% 95.09%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan etika serta budaya politik	100	1,238,202,265	0	11,905,000	-	4,910,950	100	1,110,793,020	-	102,843,805	100	1,230,452,775	100.00%	99.37%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100	1,238,202,265	100	11,905,000	100.00	4,910,950	100	1,110,793,020	100	102,843,805	100.00	1,230,452,775	100.00%	99.37%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
			1	2,250,000	0	-	1,498,000	-	8,210,000	1	46,220,000	1	58,178,000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun (dokumen)	1	61,121,000	0	2,250,000	-	1,498,000	-	8,210,000	1	46,220,000	1	58,178,000	100.00% 95.18%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di	52	1,153,922,265	0	9,655,000	-	1,372,950	52	1,092,833,020	-	45,576,875	52	1,149,437,845	100.00% 99.61%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Daerah	daerah (orang)														
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (laporan)	4	23,159,000	1	-	1	2,040,000	1	9,750,000	1	11,046,930	4	22,836,930	100.00%	98.61%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
				Predikat Kinerja											
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGETAHUAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100	77,664,400	28.00	4,910,000	50. 93	21,813,500	90, 7 4	3,520,000	143, 53	36,645,000	143.52	66,888,500	143.52%	86.13%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawas	108	77,664,400	30	4,910,000	25	21,813,500	43	3,520,000	57	36,645,000	155	66,888,500	143.52%	86.13%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4	77,664,400	1	4,910,000	1	21,813,500	1	3,520,000	1	36,645,000	4	66,888,500	100.00%	86.13%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	86.13%
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	577,235,000	100	3,040,000	100	196,452,000	100	169,936,700	100	180,369,750	100	549,798,450	100.00%	95.25%

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100	577,235,000	100	3,040,000	100	196,452,000	100	169,936,700	100	180,369,750	100	549,798,450	100.00%	95.25%		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (orang)	575	577,235,000	0	3,040,000	47	196,452,000	178	169,936,700	350	180,369,750	575	549,798,450	100.00%	95.25%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	95.25%		
		Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100	1,432,799,600	100	10,140,500	100	67,448,700	100	33,778,000	100	95,078,500	100	1,367,084,200	100.00%	95.41%		

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
			100	1,432,799,600	100	10,140,500	100.00	67,448,700	100	33,778,000	100	95,078,500		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social													
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (orang)		164	180,427,600	0	7,320,500	-	60,158,200	112	27,148,000	52	82,048,500	164	176,675,200

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (laporan)	4	29,784,500	1	2,820,000	1	7,290,500	1	6,630,000	1	13,030,000	4	29,770,500	100.00% 99.95%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	1,222,587,500	1	-	1	477,658,500	1	2,080,000	1	680,900,000	4	1,160,638,500	100.00% 94.93%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00% 95.41%
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
			8,758,174,674										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	95.14% 95.76%
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi Sangat Tinggi

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja Triwulan IV yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Triwulan IV ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan medorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada triwulan 4 Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja sasaran strategis-1 yaitu “*Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah*” dengan indicator persentase penurunan konflik IPOLEKSOSBUD. Pada Tw-4 ditargetkan 18,18% dan terealisasi 72,72% atau capaian kinerja 400%.
2. Realisasi kinerja sasaran strategis-2 yaitu “*Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada*” dengan indicator kinerja tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada, ditargetkan 80,35% dan terealisasi 80,35% atau capaian 100%. Realisasi ini masih mengacu pada hasil realisasi pemilu dan pilkada ditahun 2024.
3. Realisasi kinerja sasaran strategis-3 yaitu “*Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan daerah*” dengan indicator kinerja persentase peran ormas dalam pembangunan daerah, ditargetkan 52% dan terealisasi 54,48% atau capaian 112,46%.
4. Realisasi kinerja sasaran strategis-4 yaitu “*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*” dengan indicator nilai SAKIP, ditargetkan 70 (BB) dan terealisasi 78,65. Realisasi ini masih menggunakan realisasi tahun 2024
5. Secara umum capaian kinerja dan anggaran badan kesbangpol tahun 2025 yaitu 95,14% untuk kinerja dan 95,76% untuk anggaran
6. Factor yang menjadi penghambat pencapaian realisasi anggaran triwulan 4 tahun 2025 yaitu :

- a) Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan;
- b) Proses belanja pengadaan kendaraan dinas roda 2 yang tidak terealisasi dikarenakan pihak penyedia yang terlambat menyelesaikan dokumen administrasi

7. Rekomendasi

Upaya – upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol

- a) Percepatan realisasi anggaran
- b) Meningkatkan monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap perjanjian kinerja
- c) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang tertuang dalam KAK dan anggaran kas yang telah ditetapkan
- d) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- e) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral